



ANALISIS INFLASI PRA DAN PASCA KRISIS MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Deni Sri Haryati, Nuzulia Intan Maulida, Ika Oktafianingsih, Septi Diana Sari, Shinta Apriliawati[✉]

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Inflation, MS, NER, economic growth, GE, BBM, and monetary crisis.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fluktuasi inflasi yang terjadi pada masa pra, saat, dan pasca krisis moneter. Terdapat 5 variabel yang berkorelasi dengan inflasi di Indonesia. Variabel-variabel tersebut adalah jumlah uang beredar (JUB), nilai tukar nominal (NTN), pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah (PeP), dan bahan bakar minyak (BBM). Sebenarnya variabel tersebut memiliki hubungan dengan inflasi pada seluruh era. Namun, variabel tersebut memiliki dominasi yang berbeda pada masing-masing eranya. Era prakrisis didominasi oleh 3 variabel, yakni; pertumbuhan ekonomi, NTN, dan JUB, era krisis didominasi oleh seluruh variabel yang ada, dan era pasca krisis didominasi oleh 3 variabel, yakni; PeP, NTN, dan JUB. Variabel-variabel ini akan dijelaskan pengaruhnya terhadap inflasi pada era yang didominasi dimana apakah memiliki hubungan sebanding atau berbanding terbalik.

Abstract

This study analyzes the fluctuations in inflation that occurred in the pre, during and post the financial crisis. There are 5 variables that correlated with inflation in Indonesia. These variables are the money supply (MS), the nominal exchange rate (NER), economic growth, government expenditure (GE), and fuel oil (BBM). Actually, these variables have a relationship with inflation on the whole era. However, the variable has a predominance of different proficiency level in each era. Pre-crisis era dominated by three variables, namely; economic growth, NER, and MS, crisis era dominated by all the variables that exist, and the post-crisis era dominated by three variables, namely; GE, NER, and MS. These variables will be explained influence on inflation in an era dominated where or whether proportional or inversely proportional relationship.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: denisriharyati193@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama 69 tahun Indonesia merdeka, pemerintah telah menghasilkan banyak kebijakan yang berkaitan dalam mengatasi masalah makro ekonomi. Masalah makro ekonomi tersebut salah satunya adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian. Kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan fluktuasi inflasi pada beberapa fase dalam perekonomian Indonesia. Secara umum ada beberapa fase dalam

perekonomian di Indonesia yaitu : fase awal kemerdekaan, fase pembangunan (orde baru), fase reformasi, dan fase pasca reformasi.

Pada dasawarsa 1960-an Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Laju inflasi pada saat itu mencapai lebih dari 635%. Sejak saat itu pemerintah berusaha untuk mengendalikan inflasi dengan cara menerapkan strategi pembangunan terarah dan terencana pada tahun 1969 untuk mengendalikan laju inflasi pada tahun – tahun berikutnya agar tidak terjadi hyperinflasi kembali.

Tabel 1. Tingkat Inflasi (%) Berdasarkan IHK 1969 – 2009

Thn	Inflasi	Thn	Inflasi	Thn	Inflasi	Thn	Inflasi
1969	9,89						
1970	8,88	1980	15,97	1990	9,53	2000	9,40
1971	2,47	1981	7,09	1991	9,52	2001	12,55
1972	25,84	1982	9,69	1992	4,94	2002	10,03
1973	23,30	1983	11,46	1993	9,77	2003	5,16
1974	33,32	1984	8,76	1994	9,24	2004	6,40
1975	19,69	1985	4,31	1995	8,60	2005	17,11
1976	14,20	1986	8,83	1996	6,50	2006	6,40
1977	11,82	1987	8,90	1997	11,10	2007	6,59
1978	6,69	1988	5,47	1998	77,60	2008	11,06
1979	21,77	1989	5,97	1999	2,00	2009	2,78

Sumber : BPS dan BI, diolah

Namun, perekonomian Indonesia kembali melemah pada tahun 1997 hingga 1998. Inflasi naik tajam, dengan inflasi mencapai 77,60% pada tahun 1998 yang disertai dengan guncangan pada ruang lingkup ekonomi makro lainnya. Pasca krisis moneter selama kurun waktu 1999 sampai 2009 perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan dengan melalui berbagai kebijakan pemerintah sehingga laju inflasi dapat dikendalikan dengan rata-rata inflasi menjadi 8,15%. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana laju inflasi selama periode prakrisis hingga pasca krisis dengan menghubungkan beberapa variabel - variabel inflasi di Indonesia. Variabel tersebut diantaranya nilai tukar nominal (NTN), jumlah uang beredar (JUB), pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah (Pep), dan tingkat harga bahan bakar minyak (BBM), bagaimana

variabel - variabel tersebut memiliki hubungan sebanding atau berbanding terbalik dengan laju inflasi pada masa prakrisis sampai pasca krisis.

KAJIAN TEORI

Konsep Inflasi

Menurut AP Lahnerinflasi, inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan menurut Ackley, inflasi dikaitkan sebagai suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang dan jasa secara umum. Kemudian pendapat dari ahli ekonomi lain, Boediono (2001) mengatakan bahwa inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi tidak dapat disebut pada kenaikan harga dari satu atau dua barang saja, kecuali jika kenaikan tersebut meluas kepada

atau mengakibatkan kenaikan sebagian dari barang-barang lain.

Konsep Jumlah Uang Beredar (JUB)

Secara teknis, jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang giral. Hubungan JUB dengan inflasi dapat disajikan dengan teori kuantitas (teori Irving Fisher) yang mengatakan bahwa inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, karena hubungan JUB terhadap inflasi adalah sebanding. Formula teori ini adalah $MV = PT$, M adalah jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang tersebut, P harga, dan T adalah transaksi. Apabila semakin besar jumlah uang beredar dan kecepatan peredarannya maka semakin besar tingkat harga dan transaksi jual beli pada masyarakat. Kenaikan tingkat harga secara terus-menerus disebutkan semacam inflasi. Apabila jumlah peredaran uang terus menerus bertambah maka akan berefek pada kenaikan tingkat harga yang secara terus menerus pula. Oleh karena itu, jumlah peredaran uang dengan inflasi berhubungan sebanding.

Konsep Nilai Tukar Nominal (NTN)

Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Nilai tukar nominal memiliki hubungan dengan inflasi. Sesuai dengan teori Purchasing Power Parity, atau paritas daya beli milik David Richardo yang kemudian diakui oleh Gustave Cassel yang didasari oleh satu harga (*the law of one price*) yang mengatakan bahwa harga barang atau jasa yang sama dalam dua negara yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Formula yang dimilikinya adalah;

$$\frac{USD}{Rp(2)} = \frac{USD}{Rp(1)} \times \frac{1 + i_{RP}}{1 + i_{USD}}$$

$USD/RP(2)$ menyatakan sebagai kurs keseimbangan sesudah inflasi, $USD/RP(1)$ menyatakan sebagai kurs keseimbangan sebelum inflasi, dan i menyatakan inflasi pada mata uang tiap negara. Rumus ini menyatakan bahwa negara yang memiliki inflasi lebih besar maka mata uangnya akan terdepresiasi sedangkan negara yang memiliki inflasi lebih kecil maka

mata uangnya akan terapresiasi. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hubungan NTN dengan inflasi adalah berbanding terbalik.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Sedangkan menurut aliran merkantilisme pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan.

Hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi mengalami ambiguitas, yakni berbanding terbalik dan sebanding. Asumsi yang pertama hubungan inflasi penyebab pertumbuhan ekonomi (berbanding terbalik). Apabila inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi turun, karena inflasi menaikkan tingkat bunga, sehingga menurunkan investasi dan output yang dihasilkan secara agregat dalam wilayah tersebut (PDB) dapat turun. Apabila kenaikan output tersebut rendah, maka membawa dampak pertumbuhan ekonomi menjadi turun.

Asumsi yang kedua, hubungan pertumbuhan ekonomi penyebab inflasi (sebanding). Apabila pertumbuhan ekonomi naik, maka inflasi naik karena efek excess permintaan terhadap output dalam jangka panjang.

Konsep Pengeluaran Pemerintah PeP

Pengeluaran pemerintah bertautan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Kebijakan kontraktif adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Menurut Keynes, kebijakan fiskal yang ekspansif akan mendorong output sehingga dapat menggeser kurva IS ke kanan. Jika output bertambah terus-menerus, maka harga turun. Oleh karena itu, kebijakan ekspansif akan menurunkan inflasi, sehingga hubungan pengeluaran pemerintah dengan inflasi adalah berbanding terbalik.

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada BPS, BI, IMF yang diolah, khususnya data yang berkaitan dengan laju inflasi pada tahun 1969 sampai tahun 2009. Menurut Sugiyono (2005 : 62), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisa menurut teori yang ada. Metode penelitian *kuantitatif* merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7).

PEMBAHASAN

Perkembangan Laju Inflasi Pra Krisis Moneter

Indonesia pernah mengalami inflasi hingga 635% pada dasawarsa 1960-an. Sejak saat itu, pemerintah berusaha menyusun strategi pembangunan jangka panjang terarah dan terencana yang dimulai tahun 1969 untuk mengendalikan laju inflasi. Strategi tersebut cukup membuahkan hasil. Pada tahun 1969 – 1971 inflasi berada pada level di bawah 10%, kemudian tahun 1972 sampai dengan 1980-an laju inflasi rata – rata berada pada level 2 digit, dan pada tahun 1984 hingga 1996 dapat dikendalikan pada level 1 digit.

Tabel 2. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, NTN dan JUB 1969 – 1996 (dalam %)

Tahun	Inflasi	PE	NTN	JUB
1969	9,89	6,82	0	61,02
1970	8,88	7,55	15,95	36,48
1971	2,47	7,02	9,79	28,17
1972	25,84	7,04	0	47,94
1973	23,30	8,10	0	40,96
1974	33,32	7,63	0	40,14
1975	19,69	4,98	0	33,34
1976	14,20	6,89	0	28,23
1977	11,88	8,76	0	25,17
1978	6,69	6,77	50,60	24,02
1979	21,77	7,32	0,32	36,03
1980	15,97	9,88	-0,04	47,56
1981	7,09	7,93	2,75	29,85
1982	9,69	2,25	7,53	9,79
1983	11,46	4,19	43,54	6,29
1984	8,76	6,98	8,05	13,37
1985	4,31	2,46	4,75	17,75
1986	8,03	5,83	45,87	15,75
1987	8,90	4,93	0,55	8,63
1988	5,47	5,78	4,91	13,46
1989	5,97	7,46	3,81	39,76
1990	9,53	7,24	5,79	18,42

1991	9,52	6,95	4,79	10,59
1992	4,49	6,46	3,51	9,25
1993	9,77	6,50	2,33	27,89
1994	9,24	7,54	4,27	23,28
1995	8,60	8,22	4,91	16,10
1996	6,50	7,82	3,25	21,66

Sumber: BPS, BI, IMF , diolah

Pada tabel 2, diketahui bahwa terdapat 3 faktor terbesar inflasi penjas di masa prakrisis moneter, yakni pertumbuhan ekonomi, nilai tukar nominal (NTN), dan jumlah uang beredar (JUB). Ketiga faktor ini mempunyai korelasi sebanding atau berbanding terbalik terhadap inflasi. Pada prakrisis pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat inflasi akan turun karena mengendalikan kelebihan permintaan.

Menurut Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dinyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh gap antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginan-keinginannya terhadap barang-barang (Shapiro, 2002). Gap disini adalah permintaan masyarakat terhadap barang-barang lebih besar daripada jumlah yang tersedia sehingga terjadi kenaikan harga, yang kemudian dikenal dengan istilah inflationary gap, sehingga penurunan inflasi dapat mengendalikan kelebihan permintaan. Inflasi tinggi maka tingkat bunga tinggi, sedangkan tingkat bunga tinggi maka akan menurunkan investasi yang berkaitan dengan output yang dihasilkan secara agregat dalam satu wilayah negara. Menurut Prasentiantono (2000) mengenai suku bunga adalah : jika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Pada posisi ini, permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk mengalokasikannya ke dalam bentuk portfolio perbankan (deposito dan tabungan). Seiring dengan berkurangnya jumlah uang beredar, gairah belanja pun menurun. Selanjutnya harga barang dan jasa umum akan cenderung stagnan, atau tidak terjadi dorongan inflasi. Hal ini berkaitan dengan penurunan

output yang dihasilkan oleh produsen dikarenakan gairah belanja yang menurun yang dialami oleh konsumen.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 1969 hingga tahun 1996 memiliki rata-rata 6,68 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 1982 mencapai 2,25% dan tertinggi pada tahun 1980 mencapai 9,88%.

Namun, tidak selalu kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan inflasi. Pada tabel 2, tahun 1975 dan 1979 menurunnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan menurunnya inflasi. Hal ini disebabkan oleh dominasi efek jumlah uang beredar (JUB)

Dalam teori kuantitas (teori Irving Fisher) yang mengatakan bahwa inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, karena hubungan JUB terhadap inflasi adalah sebanding. Formula teori ini adalah $MV = PT$, M adalah jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang tersebut, P harga, dan T adalah transaksi. Apabila semakin besar jumlah uang beredar dan kecepatannya maka semakin besar tingkat harga dengan transaksi jual beli pada masyarakat. Kenaikan tingkat harga secara terus-menerus disebutkan semacam inflasi. Apabila jumlah peredaran uang terus menerus bertambah maka akan berefek pada kenaikan tingkat harga yang secara terus menerus pula. Oleh karena itu, jumlah peredaran uang dengan inflasi berhubungan sebanding.

Secara rata-rata pada masa sebelum krisis JUB berhubungan sebanding dengan inflasi. Pada tabel 2, rata – rata JUB pada masa sebelum krisis adalah sekitar 26,10. JUB terkecil ada pada tahun 1983 sebesar 6,29% dan terbesar terjadi pada tahun 1969 sebesar 69%.

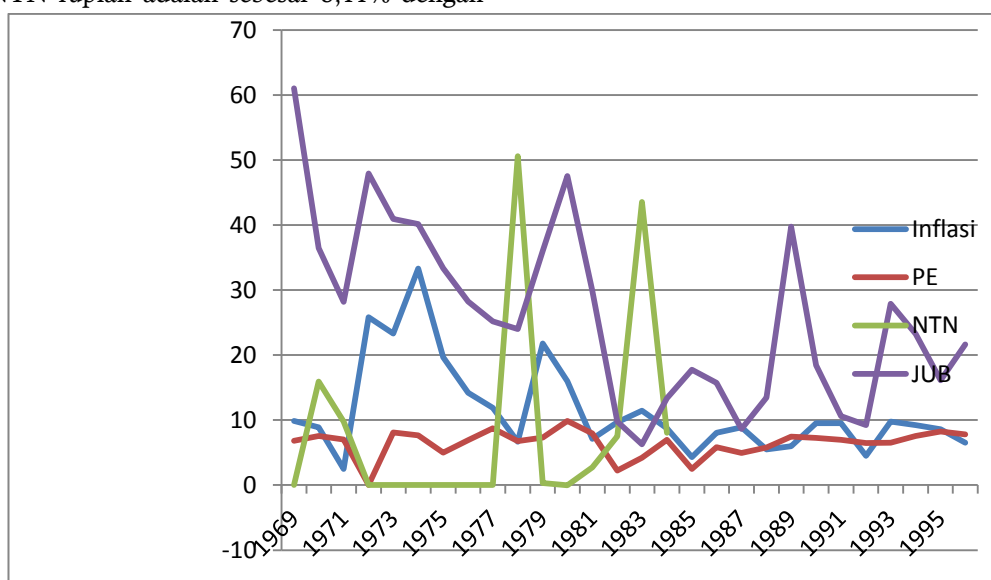
Faktor terbesar selajutnya yang mempengaruhi inflasi pada masa sebelum krisis adalah nilai tukar nominal (NTN). Secara

teori, NTN akan berbanding terbalik dengan inflasi. Secara rata-rata, fluktuasi NTN pada prakrisis berhubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Namun, tidak setiap tahun mengalami hubungan negatif. Mulai tahun 1971 hingga tahun 1979 cenderung naik turunnya NTN tidak diikuti oleh laju inflasi secara berbanding terbalik. Pada tahun 1971, inflasi mengalami penurunan dari 88,88% menjadi 2,47% dengan NTN menurun dari 19,95% menjadi 9,79%, selanjutnya enam tahun berikutnya NTN rupiah terhadap dolar tidak mengalami perubahan.

Pada masa sebelum krisis moneter, rata-rata NTN rupiah adalah sebesar 8,11% dengan

NTN terbesar pada tahun 1978 yakni 50,60% dan NTN terendah pada tahun 1980 yakni -0,040%. Rata-rata inflasi pada tahun 1969 sampai dengan 1996 ialah 11,47% atau turun sekitar 623,53% dari inflasi sebesar 635% pada dasawarsa 1960-an. Hal ini menandakan bahwa usaha pemerintah dengan strategi pembangunan jangka panjang terencana dan terarah yang dilaksanakan mulai tahun 1969 dinilai berhasil dalam mengatasi hiperinflasi.

Gambar hubungan pertumbuhan ekonomi, NTN, JUB dengan inflasi pada periode sebelum krisis:



Masa Krisis Moneter 1997-1998

Krisis moneter di Indonesia terjadi selama 2 tahun, yakni tahun 1997 dan 1998. Menurut IMF, krisis moneter pada tahun tersebut terjadi karena pemerintah terlambat

dalam meminta bantuan kepada IMF karena baru meminta bantuan setelah nilai rupiah sangat terdepresiasi, sehingga terjadi krisis moneter yang berkepanjangan. Enam variabel yang menjadi penjelas terhadap laju inflasi turut masuk dalam masa ini.

Tabel 3. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi, Pep, JUB, NTN, BBM 1997 – 1998 (dalam %)

Thn	Inflasi	PE	PeP	JUB	NTN	BBM
1997	11,10	4,70	6,58	22,24	95,13	-27,85
1998	77,60	-13,13	26,69	29,17	72,58	-38,43

Sumber: BPS, BI, IMF, diolah

Inflasi pada tahun 1998 mengalami pelonjakan dari 11,10% menjadi 77,60% atau sekitar 7 kali lipat. Hal ini, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Dimana

terjadi kenaikan inflasi yang juga diimbangi dengan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Variabel yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Pada masa krisis, pengeluaran pemerintah berjalan searah dengan laju inflasi.

Padahal, secara teori pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Hal ini disebabkan karena ada kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansif untuk mengatasi inflasi tersebut. Namun, kebijakan pemerintah tersebut tidak berpengaruh pada kenaikan laju inflasi yang tinggi pada krisis moneter ini, karena inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah saja. Rata-rata pengeluaran pemerintah pada saat krisis adalah 16,635 %.

Variabel yang ketiga adalah jumlah uang beredar (JUB). Dalam 2 tahun, JUB mempunyai hubungan yang sebanding dengan inflasi. Rata-rata JUB saat krisis adalah 25,75%.

Variabel yang ke empat adalah nilai tukar nominal (NTN). Pada masa krisis 1997-1998 tingkat NTN berhubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Rata-rata NTN pada masa krisis moneter adalah 83,85%. Hal ini sangat signifikan dengan rata-rata NTN sebelum krisis.

Variabel yang ke lima adalah BBM. Pada masa krisis tahun 1997. BBM memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Rata-rata tingkat harga BBM pada saat krisis adalah -33,14, berbanding terbalik dengan tingkat rata – rata inflasi mencapai 44,32%. Rata-rata inflasi pada tahun 1997 hingga 1998 adalah 44,35%. Rata-rata ini memang tidak sebesar pada dekade pra tahun 1969, namun dengan rata-rata inflasi sebesar ini cukup memberi dampak besar bagi perekonomian negara.

Analisis Inflasi Pasca Masa Krisis Moneter

Pada pasca krisis, terdapat 3 variabel yang sangat mendominasi pengaruhnya terhadap inflasi. Variable-variabel tersebut adalah pengeluaran pemerintah (Pep), nilai tukar nominal (NTN), dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiganya memiliki hubungan yang sebanding atau berbanding terbalik dengan inflasi.

Tabel 4. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Pep, NTN, BBm 1999 – 2009 (dalam %)

Tahun	Inflasi	Pep	NTN	BBM
1999	2,00	33,47	-11,71	131, 21
2000	9,40	24,99	35,43	9,13
2001	12,55	24,94	8,39	-32,08
2002	10,03	16,58	-14,04	52,20
2003	5,16	23,81	-5,31	9,28
2004	6,40	16,71	9,75	34,77
2005	17,11	17,76	5,81	37,16
2006	6,60	28,05	-8,24	4,37
2007	6,59	14,47	4,42	47,88
2008	11,06	26,42	16,25	-55,28
2009	2,78	27,96	-14,16	81,13

Sumber: BPS, BI, IMF , diolah

Pengeluaran pemerintah (Pep) memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Menurut Andersen (dalam Ferry Imanudin Sadikin,2010) pengeluaran pemerintah yang ekspansif mampu secara langsung (temporer) mengendalikan inflasi sedangkan untuk pengeluaran yang kontraktif dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Jika pemerintah menerapkan ekspansif pada perekonomian, maka akan meningkatkan output yang dapat mengurangi tingkat harga, sebaliknya jika output yang dihasilkan sedikit maka akan menaikkan inflasi.

Pada masa pasca krisis ini, secara rata-rata hubungan pengeluaran pemerintah dengan inflasi berbanding terbalik. Namun ada beberapa tahun di era pasca krisis hubungan berbanding terbalik ini tidak berlaku, tahun tersebut di antaranya adalah tahun 2002 dimana inflasi turun menjadi 10,58% namun pengeluaran pemerintah juga turun menjadi 16,58% dari 24,94% pada tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran pemerintah pada pasca krisis moneter adalah 23, 19%. Pada tahun 2007 pengeluaran pemerintah mencapai jumlah

terendah yakni 14,47%, sedangkan untuk jumlah tertinggi pada tahun 1999 yakni 33,47%.

Variable yang kedua adalah nilai tukar nominal (NTN). Baik era pra, saat, dan pasca variabel ini terus memiliki hubungan yang dominan terhadap inflasi. Pada pasca krisis, NTN secara rata – rata memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Pada pasca krisis, NTN tertinggi terjadi pada tahun 2000 yakni 35,43% sedangkan NTN terendah pada tahun 2009 yakni -14,16%. Namun, perubahan penurunan NTN yang paling dapat dirasakan adalah pada tahun 1999 dari 72,58% menjadi -11,51%. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan krisis moneter.

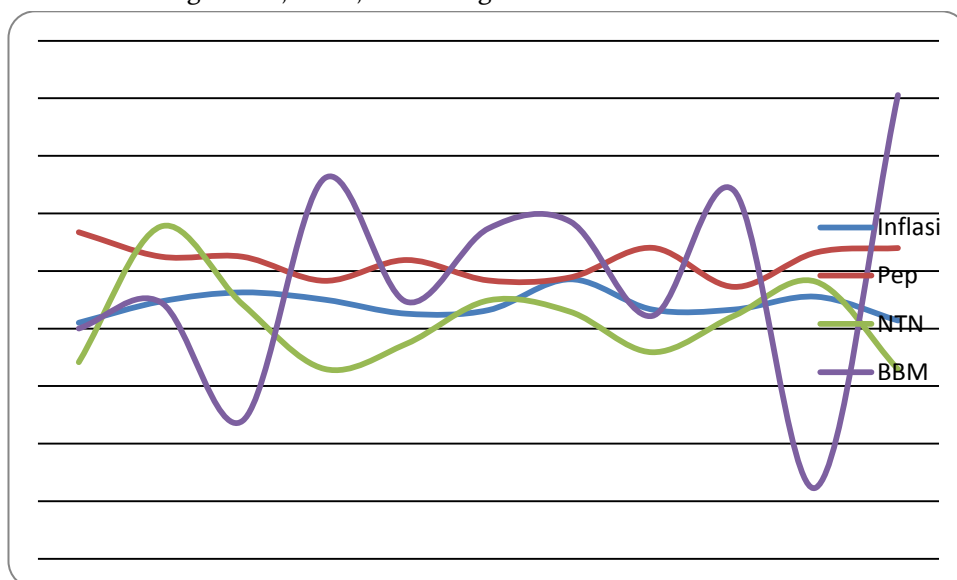
Variabel yang selanjutnya adalah BBM. Pada periode setelah krisis moneter, perubahan tingkat harga BBM berjalan searah dan tidak searah dengan inflasi. Dibuktikan dalam tabel 3, empat tahun setelah krisis yakni dari tahun 1999 hingga mencapai tahun 2002, perkembangan harga BBM tidak berjalan searah dengan laju inflasi sedangkan pada tahun berikutnya berjalan searah. Kemudian, pada tahun 2007 kembali berjalan tidak searah lagi hingga tahun

2009. Hal ini, diakibatkan karena BBM tidak hanya dihubungkan dengan inflasi saja. Ada faktor lain yang mempengaruhi BBM, misalnya kebijakan pajak dan subsidi yang tidak berlaku konstan secara terus menerus. Rata-rata harga BBM mengalami fluktuasi sebesar 17,14%. Pada tahun 1999 harga BBM termahal yakni mencapai 133,21 % sedangkan terendah pada tahun 2008 yakni -55,28%.

Rata-rata inflasi dari tahun 1999 hingga 2009 ialah 8,15%. Jika dibandingkan antara rata-rata inflasi prakrisis maka jumlah rata-ratanya lebih kecil pasca krisis dengan selisih sebesar 3,32%. Hal ini menandakan perekonomian pada pasca krisis jauh lebih baik dari era-era sebelumnya yakni pada prakrisis dan masa krisis.

Jika dikaitkan dengan politik, dalam ruang lingkup inflasi sebagai indikatornya, pemerintahan Soeharto tidak sebaik dengan rezim-rezim pemerintah pada pasca krisis mengingat Soeharto menjabat dari tahun 1968 hingga 1998. Namun, apabila dibandingkan dengan pra 1969 kebijakan pemerintahan Soeharto dinilai berhasil dalam mengatasi hyperinflasi masa dekade 1960-an.

Gambar Hubungan PeP, NTN, BBM dengan Inflasi Pasca Krisis



KESIMPULAN

Inflasi pada masa prakrisis memiliki hubungan dengan beberapa variabel, diantaranya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar

nominal (NTN), dan jumlah uang beredar (JUB). Pada masa periode krisis, inflasi lebih banyak berkorelasi dengan berbagai variabel diantaranya, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah (NTN), jumlah uang beredar (JUB), dan

tingkat harga bahan bakar minyak (BBM), sedangkan pada masa pasca krisis inflasi memiliki korelasi dengan beberapa variabel, diantaranya Pengeluaran pemerintah (Pep), Nilai Tukar Nominal (NTN), dan tingkat harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Variabel NTN adalah variabel yang paling sering dihubungkan dengan laju inflasi baik itu pra, saat, maupun pasca krisis. Pertumbuhan ekonomi dan NTN memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat inflasi, sedangkan JUB memiliki hubungan sebanding dengan laju inflasi. Pada variabel BBM , perkembangan harga BBM tidak berjalan selaras dengan laju inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono.2001.Ekonomi Makro.Yogyakarta: BPFE
- Sukirno, Sadono.2004.Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono.2009.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.Bandung: Alfabeta
- <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/133040-T%2027828-Identifikasi%20faktor-Pendahuluan.pdf> Diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 18.03 WIB.
- <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-internasional/teori-purchasing-power-parity-paritas-daya-beli-ppp/> Diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 23.05 WIB
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia Diakses pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 06.00 WIB
- <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/01/teori-teori-pertumbuhan-ekonomi.html> Diakses pada tanggal 11 Juni pukul 08.03 WIB.